

Kebijakan Hak Asasi Manusia

Archer-Daniels-Midland Company ("Perusahaan" atau "ADM") berkomitmen untuk menghormati hak asasi manusia selaras dengan [Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia](#) (UNGPs). Kebijakan ini menguraikan komitmen kami, termasuk standar yang kami terapkan di perusahaan kami dan yang kami harapkan dari mitra bisnis, serta penerapannya melalui proses uji tuntas berbasis risiko.

Pendahuluan

Tentang kebijakan ini

Kebijakan ini dikembangkan oleh tim keberlanjutan ADM dalam koordinasi erat dengan para pemimpin senior utama di seluruh bisnis, departemen, dan wilayah terkait, serta mencakup masukan dari berbagai pemangku kepentingan eksternal yang beragam, termasuk organisasi masyarakat sipil dan pakar hak asasi manusia.

Kebijakan ini telah ditinjau dan disahkan oleh Chief Executive Officer dan disetujui oleh Komite Keberlanjutan dan Teknologi Dewan Direksi perusahaan.

Kebijakan ini terintegrasi dan didasarkan pada kebijakan serta standar lain yang menetapkan persyaratan relevan bagi ADM dan mitra bisnis kami, termasuk [Kode Etik](#), [Harapan Pemasok](#) dan [Kebijakan Perlindungan Hutan, Keanekaragaman Hayati, dan Masyarakat](#).

Ini adalah pembaruan keempat sejak Kebijakan asli diterbitkan pada tahun 2014. Kami berkomitmen untuk secara rutin meninjau dan, jika diperlukan, memperbarui kebijakan ini.

Tentang ADM

ADM adalah manajer dan pengolah rantai pasok pertanian global yang penting, menyediakan ketahanan pangan dengan menghubungkan kebutuhan lokal dengan kemampuan global. Perusahaan ini juga merupakan penyedia nutrisi manusia dan hewan terkemuka, serta pemimpin dalam produk kesehatan dan kesejahteraan.

Kami bermitra dengan ribuan petani di seluruh dunia untuk membeli hasil panen mereka dan menggunakan jaringan pengadaan, logistik, dan manufaktur global terintegrasi kami untuk mengubah banyak komoditas mentah tersebut menjadi beragam produk yang melayani sektor pangan, pakan ternak, bahan bakar, serta produk industri dan konsumen.

Tujuan ADM adalah membuka kekuatan alam untuk memperkaya kualitas hidup. Kebijakan Hak Asasi Manusia kami mendukung tujuan ini dengan memandu perilaku bisnis yang bertanggung jawab di seluruh rantai nilai kami.

Komitmen

Komitmen ADM untuk menghormati hak asasi manusia dipandu oleh Prinsip-Prinsip Panduan PBB tentang Bisnis dan Hak Asasi Manusia (UNGPs), yang menetapkan tanggung jawab ini bersamaan dengan kewajiban negara untuk melindungi hak asasi manusia. Pendekatan kami juga dipandu oleh [Sepuluh Prinsip Global Compact PBB](#) dan [Pedoman OECD-FAO untuk Rantai Pasokan Pertanian yang Bertanggung Jawab](#).

Kami mengakui hak asasi manusia yang tercantum dalam [Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa](#), dan [Deklarasi Organisasi Buruh Internasional \(ILO\) tentang Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja](#).

Lingkup

Komitmen kami mencakup seluruh pekerja ADM (termasuk semua karyawan, pejabat, direktur, pekerja kontrak, dan agen ADM, divisi kami, serta afiliasi di semua negara), individu di seluruh rantai nilai kami, dan mereka yang berada di komunitas tempat kami dan mitra bisnis kami beroperasi.

Kebijakan kami berlaku untuk perusahaan kami, termasuk semua pekerja ADM. Kami mengharapkan pemasok dan mitra bisnis kami untuk menghormati hak asasi manusia dengan mengadopsi pendekatan serupa dengan yang tercantum dalam kebijakan ini, termasuk memenuhi standar inti hak asasi manusia kami.

Standar

Dalam menerapkan standar-standar ini, mungkin terjadi situasi di mana hukum nasional dan standar hak asasi manusia internasional tidak selaras. Jika terjadi konflik antara hukum nasional dan standar internasional, kita akan mematuhi hukum nasional dan mengeksplorasi bagaimana kita dapat menghormati standar hak asasi manusia internasional sebisa mungkin.

- **Kebebasan Berserikat dan Perundingan Kolektif** – Kami menghormati hak karyawan kami untuk bergabung, membentuk, atau menahan diri untuk tidak bergabung atau membentuk organisasi seperti serikat pekerja, dan tanpa takut akan pembalasan, intimidasi, atau pelecehan. Jika karyawan diwakili oleh serikat pekerja yang diakui secara hukum, kami mendukung terjalinnya dialog konstruktif dengan perwakilan yang mereka pilih secara bebas. Apabila hak kebebasan berserikat dibatasi oleh hukum, atau karyawan memutuskan untuk tidak menunjuk perwakilan, kami mendukung cara keterlibatan alternatif, seperti komunikasi langsung dan terbuka antara karyawan dan manajemen.
- **Kerja Paksa atau Kerja Wajib** – Kami melarang semua bentuk kerja paksa, termasuk kerja paksa di penjara secara tidak sukarela, kerja paksa dengan ikatan utang, kerja paksa kontrak, serta segala bentuk perbudakan modern atau perdagangan manusia dalam operasi dan rantai pasokan kami. Keputusan terkait pekerjaan harus didasarkan pada pilihan yang bebas dan berdasarkan informasi yang memadai. Syarat dan ketentuan pekerjaan akan dikomunikasikan pada saat perekrutan, dan pekerja berhak untuk mengakhiri hubungan kerja mereka. Para pekerja tidak boleh dikenakan biaya untuk mendapatkan atau mempertahankan pekerjaan mereka, dan syarat kerja tidak boleh membatasi kebebasan bergerak mereka melalui praktik-praktik seperti penahanan dokumen identitas, barang pribadi, deposit, atau jaminan yang tidak sah apa pun. ADM tidak mentolerir penggunaan hukuman fisik, ancaman kekerasan, atau bentuk-bentuk pelecehan lainnya terhadap para pekerjanya.
- **Kerja Anak** – Kami melarang kerja anak, yaitu pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moralitas anak, pekerjaan yang mengganggu pendidikan wajib, atau pekerjaan yang dilakukan oleh anak-anak yang belum cukup umur. prinsip-prinsip ILO yang relevan, termasuk Konvensi ILO 138, dengan mempertimbangkan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.
- **Pelecehan dan Diskriminasi** – Kita berupaya untuk mempertahankan lingkungan kerja yang aman, penuh hormat, dan inklusif yang bebas dari pelecehan, diskriminasi, dan pembalasan. Kami melarang diskriminasi dalam operasi dan rantai pasokan kami berdasarkan ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, identitas gender, asal negara, kewarganegaraan, disabilitas, usia, orientasi seksual, status pernikahan, atau karakteristik lain yang dilindungi secara hukum. Larangan ini juga berlaku untuk kelompok rentan, termasuk pekerja migran. Kami tidak mentolerir perilaku yang tidak diinginkan (baik seksual maupun non-seksual) — baik secara verbal, fisik, maupun visual — yang dapat menakutkan, menyinggung, merendahkan, atau menciptakan lingkungan kerja yang bermusuhan atau penuh pelecehan.

- **Kondisi Kerja yang Aman dan Sehat** – Kami berupaya menyediakan lingkungan kerja yang aman dan sehat serta mematuhi hukum dan peraturan kesehatan dan keselamatan yang berlaku. Kita akan memelihara sistem dan prosedur yang dirancang untuk menjaga keselamatan pekerja dan melindungi mereka dari bahaya, pelecehan, dan tindak kekerasan dalam pekerjaan.
- **Jam Kerja, Upah, dan Tunjangan** – Kami memberikan kompensasi karyawan sesuai dengan semua hukum dan peraturan setempat yang berlaku, termasuk yang berkaitan dengan upah minimum dan pembayaran lembur. Jam kerja harus sesuai dengan persyaratan hukum dan perjanjian perundingan bersama yang berlaku di lokasi.
- **Hak Atas Tanah** – Kita menghormati hak penguasaan atas tanah dan hak masyarakat adat serta lokal, termasuk hak untuk memberikan atau menolak persetujuan bebas, terlebih dahulu, dan berdasarkan informasi (FPIC) terhadap operasi di tanah yang menjadi hak hukum atau hak adat mereka. Kami berharap semua pemasok menjunjung tinggi prinsip-prinsip FPIC dalam operasi dan transaksi bisnis mereka.
- **Air** – Kami menghormati hak untuk mengakses air minum yang aman dan bersih serta sanitasi dalam seluruh operasi dan rantai pasokan kami, dan mengakui [Resolusi PBB tentang Hak Asasi Manusia atas Air](#).

Pembela Hak Asasi Manusia

ADM tidak menoleransi ancaman, serangan, atau tindakan balasan terhadap individu atau organisasi mana pun yang menyampaikan keprihatinan terkait hak asasi manusia dengan itikad baik, serta berupaya melindungi pelapor dan pengadu hak asasi manusia. Kami juga percaya bahwa dialog terbuka dan berkelanjutan dengan pembela hak asasi manusia, juru bicara komunitas, dan pemangku kepentingan lainnya sangat penting untuk memberikan informasi dan memperkuat program-program tersebut.

Pelaksanaan

Pendekatan

ADM mengadopsi pendekatan berbasis risiko dalam pelaksanaan uji tuntas hak asasi manusia untuk mengidentifikasi, mencegah, memitigasi, dan mempertanggungjawabkan cara perusahaan menangani dampak negatif di seluruh rantai nilainya. Pendekatan kami didukung oleh upaya kami untuk menanamkan hak asasi manusia ke dalam operasi kami sendiri dan operasi mitra bisnis kami, serta didasarkan pada keterlibatan pemangku kepentingan yang berkelanjutan, termasuk dengan pemangku kepentingan yang terdampak. Kami mengukur efektivitas pendekatan kami, dan tim keberlanjutan secara berkala melaporkan kemajuan kepada Komite Keberlanjutan dan Teknologi Dewan Direksi serta memublikasikan laporan keberlanjutan tahunan, yang tersedia di adm.com. Kami berupaya untuk terus melakukan perbaikan, menggunakan wawasan yang diperoleh dari praktik kami untuk menyempurnakan dan meningkatkan kebijakan, standar, dan implementasinya.

Manajemen dan Tata Kelola

Tim keberlanjutan, yang dipimpin oleh Chief Sustainability Officer, memiliki kebijakan tersebut dan memfasilitasi pelaksanaannya dengan bekerja sama dengan departemen terkait, termasuk Operasi, Rantai Pasok dan Pengadaan, Origination (pengadaan sumber), Kesehatan dan Keselamatan Lingkungan, Kepatuhan dan Hukum, untuk mengevaluasi risiko, mengidentifikasi dan melaksanakan tindakan yang terarah dan terukur untuk mengatasi risiko tersebut, serta menyediakan tata kelola dan pengawasan.

Komite Keberlanjutan dan Teknologi Dewan Direksi mengawasi tujuan, sasaran, strategi, dan aktivitas Perusahaan yang berkaitan dengan keberlanjutan, termasuk hak asasi manusia. Chief Sustainability Officer,

Senior Vice President of Global Operations, dan Chief Technology Officer perusahaan secara rutin menghadiri rapat komite sebagai perwakilan manajemen. Dewan Eksekutif ADM, badan strategis dan operasional tertinggi Perusahaan, memberikan pengawasan ketat terhadap upaya Lingkungan, Sosial, dan Tata Kelola (ESG) Perusahaan serta tinjauan mendalam terhadap isu-isu keberlanjutan.

Due Diligence dalam Praktik

Sebagai pengelola dan pengolah rantai pasokan pertanian global yang penting, program uji tuntas kami mencakup berbagai macam komoditas dan bahan baku di seluruh rantai nilai global kami. Meskipun agak bergantung pada mitra bisnis, pemerintah daerah, dan pemangku kepentingan lainnya, kami menghormati hak asasi manusia dan berkomitmen pada langkah-langkah berikut:

- **Mengintegrasikan hak asasi manusia** - ADM berupaya mengintegrasikan hak asasi manusia dengan kolega dan mitra bisnis, termasuk dengan: mengambil pendekatan lintas fungsi di seluruh unit bisnis, departemen, dan wilayah geografis untuk melaksanakan uji tuntas: meningkatkan kesadaran, misalnya dengan menyediakan kebijakan ini dan dokumen relevan lainnya dalam berbagai bahasa di situs web kami; serta memberikan pelatihan bagi mereka yang memainkan peran kunci dalam pelaksanaannya.
- **Mengidentifikasi dan memprioritaskan dampak buruk potensial dan aktual** - ADM secara berkala mengevaluasi operasi dan rantai pasokannya untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan dampak buruk yang potensial dan aktual terhadap hak asasi manusia. Kami menggunakan pendekatan penilaian risiko yang signifikan, berdasarkan tingkat keparahan dan kemungkinan terjadinya, untuk mengidentifikasi dan memprioritaskan isu-isu hak asasi manusia kami yang paling signifikan.
- **Mengambil tindakan terhadap dampak buruk yang potensial dan aktual** - ADM mengambil langkah-langkah yang tepat untuk mengatasi dampak buruk. Pendekatan kita didasarkan pada ekspektasi yang ditetapkan dalam Prinsip-Prinsip Panduan PBB (UNGP), termasuk tingkat keterlibatan kita terhadap dampak tersebut, dan dapat mencakup tindakan-tindakan berikut: ketertelusuran kembali ke asal rantai pasokan komoditas yang kompleks; prosedur formal untuk [mengelola ketidakpatuhan pemasok](#), penggunaan skema sertifikasi pihak ketiga yang kredibel; peningkatan kapasitas bagi pemasok di wilayah berisiko tinggi; program audit pihak ketiga untuk mengatasi masalah di lokasi dan mitra bisnis tertentu; dan tindakan kolaboratif dengan rekan sejawat, mitra bisnis, dan pihak lain.
- **Pengukuran dan Komunikasi Kemajuan** – Kami mengukur kemajuan program kami untuk menilai kinerja dan mengidentifikasi perubahan pada pendekatan dan aktivitas kami. Kami memberikan informasi lebih lanjut tentang pendekatan kami dan kemajuan kami dalam memenuhi kebijakan kami melalui halaman web kami pada [ADM Human Rights](#), yang juga memuat kebijakan dan laporan terkait. ADM juga memelihara [Log Keluhan dan Penyelesaian](#) untuk menunjukkan masalah yang diajukan dan kemajuan yang dicapai dalam menanganinya.
- **Keluhan dan Penyelesaian** – ADM berupaya agar penyelesaian dan penanganan keluhan dapat sesuai dengan tanggung jawab yang ditetapkan dalam UNGP. Kami menyelidiki semua dugaan pelanggaran terhadap kebijakan kami sesuai dengan protokol dan prosedur yang telah ditetapkan, menangani insiden secara kasus per kasus untuk memastikan penyelesaian yang tepat.

Para pemangku kepentingan diimbau untuk menghubungi [Saluran Bantuan ADM Way](#) di mana mereka memiliki kekhawatiran bahwa komitmen dan kebijakan ADM, termasuk untuk hak asasi manusia, tidak dipenuhi. ADM tidak mentolerir pembalasan terhadap siapa pun yang telah membuat laporan dengan itikad baik tentang kemungkinan pelanggaran. Jika hukum setempat mengizinkan, kekhawatiran dapat dilaporkan secara anonim. ADM juga memiliki saluran 'Pengaduan dan Penyelesaian' untuk menyampaikan kekhawatiran dan melaporkan

masalah yang tercakup dalam Kebijakan Perlindungan Hutan, Keanekaragaman Hayati dan Masyarakat serta Kebijakan Hak Asasi Manusia kami, yang dapat diajukan ke: responsibility@adm.com.

- **Keterlibatan Pemangku Kepentingan** – Kami secara teratur melibatkan diri dengan pemegang hak, termasuk komunitas dan pekerja, serta pemangku kepentingan lainnya seperti pakar bidang dan masyarakat sipil untuk mendukung pendekatan dan kegiatan hak asasi manusia kami serta isu-isu spesifik.

